

BAB I

PUTARAN AWAL RODA PENELITIAN

“What can be added to the happiness of a man who is in health,
out of debt, and has clear conscience?”
(Adam Smith)

1.1 Pengantar Penelitian

Roda adalah salah satu bagian kendaraan yang mempunyai fungsi penting dalam sebuah kendaraan. Tanpa adanya roda, kendaraan tidak akan bisa digunakan untuk berjalan ke tempat tujuan oleh pengemudi. Begitu pula dalam penelitian, Putaran awal roda penelitian menjadi hal penting dalam sebuah penulisan. Dengan putaran awal inilah kita dapat melihat kemana tujuan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah kendaraan cantik berlipstik merah. Kendaraan cantik ini merupakan kendaraan yang digunakan sebagai penggerak kegiatan instansi sektor publik yang mana harus terus dipelihara karena merupakan aset daerah. Keberadaannya bukan menjadi barang yang hanya digunakan namun tidak diamankan.

Adanya fenomena tunggakan pajak kendaraan bermotor plat merah, artinya Pemda yang telah di berikan amanah untuk memakai plat merah mempunyai hutang pajak yang harus dibayarkan. Menurut ungkapan dari adam smith di atas, apa yang perlu ditambah untuk orang yang sehat dan bebas hutang serta mempunyai hati nurani yang bersih?. Dengan demikian orang yang masih punya hutang masih dikategorikan sebagai orang yang belum bahagia. Peneliti ingin mengetahui bagaimana bisa kendaraan plat merah yang notabennya telah di anggarkan masih mengalami tunggakan. Berangkat dari fenomena tersebut,

penting untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan kendaraan plat merah dari sisi pencatat wajib pajak kendaraan plat merah yaitu UPTD dan dari sisi pencatat aset kendaraan plat merah yaitu BPKAD. Karena jumlah wajib pajak kendaraan bermotor plat merah mengacu pada jumlah aset yang ada di daerah tersebut. Inilah putaran awal roda penelitian dengan memfokuskan pada pencarian informasi mengenai apa penyebab dari adanya tunggakan pajak kendaraan plat merah.

Alat transportasi darat (kendaraan bermotor) di tanah air semakin tahun semakin memuncak keberadaannya, kehadirannya bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder layaknya jaman dahulu. Saat ini kendaraan bermotor dalam sebuah keluarga menjadi kebutuhan primer yang harus mereka miliki untuk menunjang segala rutinitas kehidupan mereka. Fenomena kemacetan di berbagai daerah menandakan jumlah kendaraan baik roda 2 dan roda 4 terus bertambah seiring berjalannya waktu.

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Menurut Jenisnya di tahun 2012-2013

Tahun	Mobil penumpang	bus	truk	Sepeda motor	jumlah
2012	10 432 259	2 273 821	5 286 061	76 381 183	94 373 324
2013	11 484 514	2 286 309	5 615 494	84 732 652	104 118 969

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Dari Tabel di atas dapat kita lihat, berbagai jenis alat transportasi darat mengalami kenaikan yang cukup tinggi pertahun. Mulai dari mobil penumpang, bus, truk, sepeda motor akan terus memenuhi jalanan di Indonesia seiring meningkatnya kendaraan bermotor. Data diatas menunjukkan bahwa sepeda

motor mengalami laju perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan yang lain.

Pemilik kendaraan bermotor tentu tidak terlepas dari adanya pembayaran pajak yang dibayarkan setiap tahunnya. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan suatu kendaraan disebut dengan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Di Indonesia ada berbagai macam Penggolongan pajak, berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. (www.pajak.go.id)

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh provinsi adalah PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Hal ini tertera dalam UU No.28 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang jenis pajak yang berbunyi:

Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

“Sistem Pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yaitu dengan mengaitkan pada pendaftaran STNK, pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK, termasuk pungutan lainnya seperti asuransi Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang diberlakukan pada 1 Januari 2010. Sistem pemungutan ini dilandaskan pada satu kantor yang dinamakan kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap)” (Rohemah;2013). Hasil dari pungutan Pajak Kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif dengan mampu menaikkan pendapatan bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi tersebut. “Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%” (Panca,dkk: 2006)

Adanya bagi hasil paling sedikit 30% harusnya bersinergi dengan pemasukan pendapatan daerah melalui PKB. Meningkatnya kendaraan bermotor dan adanya bagi hasil ternyata tidak menjamin dapat menaikkan penghasilan pajak daerah jika setiap tahunnya terjadi penunggakan dalam pembayaran pajak. “Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara” (Anwar,2015:). Dengan demikian fenomena banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor akan mempersulit pemasukan pajak. Penunggakan pajak terjadi di berbagai daerah, salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan Madura. Sesuatu yang menarik perhatian adalah adanya tunggakan pajak kendaraan plat

merah di Kabupaten Bangkalan yang seharusnya di bayar setiap tahun justru terabaikan begitu saja.

Beberapa media *online* di Madura angkat bicara masalah penunggakan pajak kendaraan plat merah di Kabupaten Bangkalan. Berikut ini rangkuman dari berbagai sumber media online. Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendapatan Daerah, Jawa Timur, mencatat dalam lima tahun terakhir, sebanyak 1.401 unit kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum membayar pajak. Mereka terdiri dari 1.265 unit roda dua dan 136 unit roda empat. "Ada yang nunggak dari tahun 2011 sampai sekarang, ada dari tahun 2012 sampai sekarang, bervariasi," kata Kepala UPT Dispenda Jawa Timur di Bangkalan, Muharyanto, Selasa, 11 Agustus 2015. Akibat banyaknya kendaraan pelat merah yang belum membayar pajak itu, potensi pajak yang tertunggak mencapai lebih dari Rp 126 juta. Muharyanto menilai tunggakan itu mestinya tidak terjadi karena nilai pajak kendaraan pelat merah jauh lebih murah daripada kendaraan umum. "Lebih murah 50 persen," kata dia. (Tempo.CO, 04 November 2015)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bangkalan, Ahmat Hafid, ketika dikonfirmasi membenarkan jika mobil dan sepeda motor dinas banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. "Iya memang belum bayar pajak, tapi bukan mobil dinas Pemkab Bangkalan semua, jumlah mobil dinas yang belum bayar pajak itu ada mobil dinas dari instansi vertikal seperti Pengadilan, Kejaksaan, Universitas Trunojoyo Madura dan mobil Dispenda Jatim," kata Ahmat Hafid. (Madura news media.com, 04 November 2015).

Semestinya pejabat daerah mengerti pentingnya membayar pajak karena berpendidikan. Tapi, faktanya tidak begitu,” sesalnya. Dijelaskan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar tunggakan pajak kendaraan dinas tersebut segera dilunasi. Bahkan, Muhariyanto mengaku sudah mendatangi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan untuk membantu dan mendesak semua pimpinan SKPD segera membayar tunggakan pajak. ”Tapi, belum ada perubahan yang signifikan. Karena itu, kami dibantu aparat kepolisian mengagendakan razia empat kali dalam satu bulan,” imbuhnya. (madura terkini, 08 Maret 2016).

Berangkat dari banyaknya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya berpotensi menaikkan pendapatan daerah ,peneliti mencoba menelusuri kebenaran pernyataan media tentang banyaknya tunggakan tersebut dengan melakukan wawancara pada dua instansi yang mempunyai perananan penting dalam hal pungutan pajak kendaraan bermotor yaitu UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Samsat Kabupaten Bangkalan. Kedua Instansi tersebut memberikan informasi yang senada terkait adanya tunggakan pajak kendaraan plat merah.

“ya banyak mbak,,,kendaraan yang nunggak di Bangkalan ini. Ada yang roda 2,roda 4, roda tigapun ada yang nunggak. padahal tarifnya itu lebih rendah dari sepeda motor biasa, saya juga heran kenapa *sampek* nunggak bayar pajaknya. sekarang sudah ada e-samsat yang kami bisa cek kapan saja, jadi nunggaknya berapa tahun ya kelihatan mbak. Mereka juga bisa cek sendiri di e-samsat ini.” (wawancara dengan Kepala Samsat Kabupaten Bangkalan, Pak Suroto,11 Desember 2015)

“Ketika jatuh tempo misalnya tanggal ini ya , mereka tidak bayar. Besok sudah dikeluarkan surat yang namanya SKPD, surat ini merupakan surat teguran pertama. Skpd Sampai satu bulan tidak membayar dikeluarkan lagi surat stpd, stpd sampai 14 hari tidak membayar dikeluarkan SP1. SP1 sampai 21 hari

tidak membayar dikeluarkan SP2. SP2 sampai 21 hari tidak di bayar keluarlah SP atau surat paksa, ada banyak itu mbak, banyak yang sampai surat paksa. Sampai lebih melewati.” (wawancara dengan kepada bidang penagihan UPTD Pendapatan kabupaten Bangkalan, Pak Wito, 15 Maret 2016)

Pihak UPTD dan SAMSAT membenarkan berita yang beredar di masyarakat, bahwa plat merah di Kabupaten Bangkalan mengalami tunggakan PKB yang cukup banyak. Pihak penagihan UPTD mengakui jumlah kendaraan plat merah banyak yang melewati batas surat paksa. Dari hasil observasi awal, peneliti meminta data jumlah kendaraan yang mengalami tunggakan di Kabupaten Bangkalan. Data yang berhasil peneliti dapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi Jawa Timur Bangkalan adalah Data penunggakan pajak kendaraan bermotor yang terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 : Beberapa Data Tunggakan Plat Merah Kabupaten Bangkalan s.d Maret 2016

No.	Nama	Total Unit	Jumlah (Rp)
1	PEMKAB BANGKALAN	330	45.583.550
2	BKKBN BNGKALAN	70	1.533.000
3	DEPAG BANGKALAN	19	798.000
4	DINKES BANGKALAN	23	2.039.000
5	KANTOR DEPDIKBUD BANGKALAN	22	465.000
6	KANTOR STATISTIK BANGKALAN	10	188.000
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	1.542.000
8	KANTOR DEP P&K	11	138.250
9	BADAN PUSAT STATISTIK	6	261.000
10	DISHUB KOM INFO KABUPATEN BANGKALAN	6	2.964.000
		508	55.511.800

Sumber : UPT Dispenda Provinsi Jawa Timur Bangkalan,diolah

Dari fenomena di atas menggugah hati untuk mengetahui lebih dalam kenapa sampai terjadi penunggakan pajak kendaraan plat merah di kabupaten Bangkalan. Data yang peneliti dapatkan di UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah tentang kendaraan dinas yang mengalami tunggakan , nama

PEMKAB menduduki persentase tertinggi dalam daftar diatas, atas rasa penasaran, pencaian data berlanjut pada BPKAD yaitu instansi yang memiliki peran untuk mengelola aset daerah, salah satu aset daerah adalah kendaraan plat merah. Data di BPKAD menunjukkan bahwa kendaraan plat merah di kabupaten Bangkalan sudah rinci atas nama SKPD. Menengok dari data sebelumnya tentang data tunggakan dari UPTD yang menyatakan kendaraan atas nama Pemkab sangat banyak mengalami tunggakan, serta di BPKAD sudah tidak terdapat nama Pemkab. peneliti ingin menelusuri rumitnya masalah tunggakan plat merah di Kabupaten Bangkalan dan dikaitkan dengan dengan jumlah aset kendaraan plat merah di Kabupaten Bangkalan..

Selain karena perbedaan data antara UPTD dan BPKAD, alasan pendukung peneliti lebih memilih pajak kendaraan plat merah sebagai topik penelitian dibanding pajak kendaraan plat hitam karena perbedaan tarif antara plat merah dengan plat hitam. Tarif pajak kendaraan bermotor plat merah dengan plat hitam tentulah tidak sama, Adanya perbedaan fungsi pemakaian menyebabkan keduanya harus dibedakan. Ketika plat merah berjalan untuk kepentingan publik dan harus digunakan sesuai dengan kepentingan sebuah organisasi, plat hitam bebas memutar roda-rodanya untuk kemana saja yang pengemudi kehendaki. Untuk keseragaman penetapan tarif PKB, pemerintah telah menuangkan dalam sebuah Peraturan Gubernur Jawa Timur no.77 tahun 2014 pasal 10 yang berbunyi :

“Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ; dan 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.”

Dengan demikian tarif pajak kendaraan dinas yang notabennya lebih rendah daripada pajak kendaraan umum seharusnya secepatnya dibayar dan tidak perlu ada tunggakan. Alasan kedua adalah, karena pajak kendaraan plat merah menurut salah satu pejabat daerah sudah ada anggaran. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang telah diberikan anggaran untuk membantu melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah, seharusnya dapat menganggarkan pajak kendaraan “plat merah” dan di bayarkan rutin setiap bulannya.

Penelitian terdahulu datang dari Susilawati dan Budiarta (2013) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode proportional sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja Teknik Analisis Data menggunakan Regresi linier berganda dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ermawati,dkk (2013) yang berjudul Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Propinsi DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Hasilnya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Febriati (2011) dengan penelitian berjudul Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang analisis flow chart, analisis struktur organisasi dan compliance test yang dipergunakan untuk menilai sistem pengendalian intern dan alat analisis untuk prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Adapun alat analisis kualitatif dengan menggunakan flow chart menunjukkan sistem dan prosedur yang dipergunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Analisa struktur organisasi dilakukan untuk mengetahui kerangka pokok dari pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok organisasi. Sedangkan compliance test dilakukan untuk mengetahui apakah kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan memadai sehingga dapat mendukung keyakinan akan efektivitas sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah (UPPD) Kota Singkawang sudah efektif. Untuk informasi dalam formulir sudah memadai karena berisi informasi yang benar-benar diperlukan sebagai pembuktian keaslian arsip kendaraan bermotor untuk menghindari pemalsuan data. Struktur organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) sesuai dengan perancah dimana terdapat pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga dapat mengontrol segala pelaksanaan kegiatan. Sistem Internal Control pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang cukup efektif.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kendaraan bermotor yang sifatnya umum (plat hitam). Penelitian yang akan saya lakukan mempunyai keunikan tersendiri, karena berfokus pada kendaraan dinas yang merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan daerah dan telah dianggarkan. Dengan adanya fenomena tunggakan pajak kendaraan dinas dan perbedaan data antara 2 instansi yang telah disebutkan di atas, peneliti ingin mengetahui penyebab banyaknya tunggakan plat merah di Kabupaten Bangkalan dan kaitannya dengan rumitnya perbedaan data tersebut dengan menggali informasi dari pihak UPTD Dinas pendapatan Provinsi Jawa Timur dan BPKAD sebagai informan kunci serta dari beberapa SKPD sebagai Informan pendukung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kronologi diatas, untuk mengetahui dan memahami pengelolaan kendaraan plat merah sebagai aset daerah dan sebagai wajib pajak kendaraan plat merah di Bangkalan, ada pertanyaan yang perlu ditelaah. Pertanyaan berikut ini nantinya diharapkan dapat menjawab masalah yang ada.

Rumusan masalah yang diambil adalah apa yang menjadi pemicu keruhnya tunggakan plat merah di Kabupaten Bangkalan?. Penelusuran Permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada isu-isu tunggakan kendaraan plat merah serta yang diduga menjadi penyebab adanya tunggakan yang berulang-ulang dari tahun ke tahun terhadap pajak kendaraan dinas mulai dari roda 2 maupun roda 4.

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menelaah segala bentuk pertanyaan yang telah diajukan, diharapkan dapat mengetahui dapat mengetahui penyebab penunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian permasalahan yang ada masalah tunggakan pajak kendaraan plat merah dapat dipecahkan.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yaitu : Pertama, kontribusi teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan gambaran tentang kondisi mengenai fenomena banyaknya tunggakan pajak kendaraan dinas dimulai dari melihat pengelolaan kendaraan dinas dan memberikan gambaran tentang penyebab penunggakan pajak kendaraan dinas. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadi bahan referensi sebagai acuan riset masa depan.

Kedua, kontribusi pemerintah daerah, baik UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangkalan, BPKAD Bangkalan serta SKPD yang terkait dengan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengawasi jalannya pembayaran pajak kendaraan dinas

demi terselenggaranya pembayaran pajak kendaraan dinas yang rutin dan pengelolaan kendaraan plat merah yang baik.